

Mengetahui/Mengesahkan :
Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya
Banjarbaru, ...
a.n Kepala Bidang Pembinaan PTK

BUPATI TANAH BUMBU
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45/ 283 /DISDIKPORA/ 2013

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMA BERKAT MUFAKAT
MENJADI SMA NEGERI 1 KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU

Kasi PTK SMA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan

Rosiadi Indrawan, SH, MH
Penata Tk. I
19850715 201101 1 002

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421.3/0903-MN/Disdikpora/2013 tertanggal 06 Mei 2013 bahwa SMA Berkat Mufakat Kecamatan Kuranji dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Negeri dengan nama SMA Negeri 1 Kuranji;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan misi pendidikan nasional tentang 5K terutama yang berkaitan dengan K1 (Ketersediaan) dan K2 (Keterjangkauan) layanan pendidikan, dan dalam rangka mensukseskan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU);
- c. bahwa untuk memenuhi kabutuhan masyarakat terhadap pendidikan, maka dipandang perlu untuk mengembangkan lembaga pendidikan melalui perubahan status SMA Berkat Mufakat menjadi SMA Negeri 1 Kuranji di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status SMA Berkat Mufakat menjadi SMA Negeri 1 Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mengetahui/Mengesakan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Banjarbaru, ... 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 100/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Kasi PTK SMA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Kalimantan Selatan

Rosiadi Indrawan, SH, MH

Penata Tk. I

19850715 201101 1 002



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SMA BERKAT MUFAKAT MENJADI SMA NEGERI I KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Mengubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Berkat Mufakat Kecamatan Kuranji, NSS 202-1511-10-001, menjadi SMA Negeri 1 Kuranji, NSS 201-1511-10-001;

KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Berkat Mufakat yang diubah statusnya menjadi SMA Negeri 1 Kuranji sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU** terletak di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Mei 2013

BUPATI TANAH BUMBU,



Mengetahui/Mengesahkan :

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Banjarbaru, ...

an Kepala Bidang Pembinaan PTK

Kasi PTK SMA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Kalimantan Selatan

Rosiadi Indrawan, SH, MH

Penata Tk. I

19850715 201101 1 002





BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 243 TAHUN 2003

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan meningkatnya jumlah siswa untuk melanjutkan sekolah ketingkat SMU dan terbatasnya sekolah yang ada serta dalam rangka melaksanakan program Pendidikan Nasional yang lebih baik di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu ada penambahan sekolah menengah umum baik sekolah Negeri atau Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 7 Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri atau Swasta yang nama dan tempatnya sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) dan lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri / Swasta , maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut:
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pelajaran.
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 3. Membuat laporan kepada Bupati Atas Berdirinya Sekolah menengah Umum Negeri dan Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam APBN dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2003.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal Juni 2003



BUPATI TANAH BUMBU

H. ZAIRULLAH AZHAR

Tembusan:

- 1 Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 2 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
- 3 Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
- 4 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 5 Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 6 Kepala Bawasda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 7 Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 8 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
- 9 Seluruh Camat di Kabupaten Tanah Bumbu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : TAHUN 2003
TANGGAL : JUNI 2003

**DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

No	Nama Sekolah	Status	NSS	Alamat	Kecamatan
1	SMAN 1 Satui	Negeri	301151204001	Jl. Propinsi Km. 167	Satui
2	SMAN 1 Kusan Hulu	Negeri	301151205001	Jl. Pemerintahan Desa Binawara	Kusan Hulu
3	SMAN 2 Batulicin	Negeri	301151201002	Jl. Transmigrasi Km. 42 Desa Sukadamai	Batulicin
4	SMA Berkat Mufakat	Swasta	302151205002	Desa Giri Mulya Sebamban VI	Kusan Hulu



BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR